

**ANALISIS PENERAPAN WAKALAH PADA PEMBIAYAAN MURĀBAHAH DI
KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam

Oleh:
Yakis Munir
NIM: I000132018

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PENERAPAN WAKALAH PADA PEMBIAYAAN MURĀBAHAH DI KSPPS
BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA**

NASKAH PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

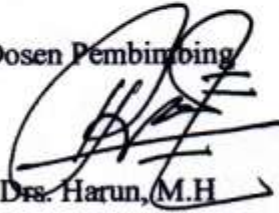
Yakis Munir

I000132018

NIRM: 14/X/02.1.2/0886

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing


Drs. Harun, M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PENERAPAN WAKALAH PADA PEMBIAYAAN MURĀBAHAH DI KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA

Oleh:

Yakis Munir

I000132018

NIRM: 14/X/02.1.2/0886

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Rabu, 10 Januari 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Drs. Harun, M.H
(Ketua Dewan Penguji)

(.....)

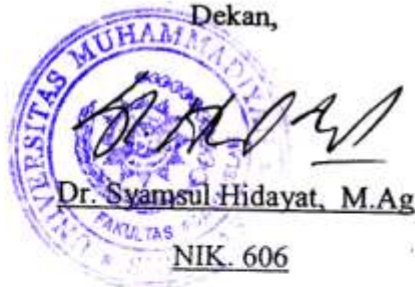
2. Azhar Alam, S.E., LC., M.SEI
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

3. Dr. Mu'inudinillah Basri, MA.
(Anggota III Dewan Penguji)

(.....)

Dekan,


Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag
NIK. 606

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidak beneran dalam pernyataan di atas, maka saya akan mempertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 12 Januari 2018

Penulis


YakisMunir

NIM: 1000132018

ANALISIS PENERAPAN WAKALAH PADA PEMBIAYAAN MURĀBAHAH DI KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA

Abstrak

Pembiayaan jual beli (*murābahah*) merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut secara jujur kepada pembeli. Posisi lembaga keuangan dalam hal ini melakukan pembelian terhadap barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan selanjutnya setelah barang yang diperoleh dijual kepada nasabah dengan harga jual yang disepakati dan nasabah dapat membayar dengan cara mengangsur atau melunasi pada periode tertentu. Terkait dengan pembiayaan jual-beli (*murābahah*), terkadang lembaga keuangan mikro syariah (BMT) menyertakan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murābahah*, yaitu pihak BMT mewakili pembelian barang kepada anggota dan BMT hanya memberikan uang kepada anggota, selanjutnya anggota membelikan sendiri barang sesuai dengan akad. Namun demikian, dalam prakteknya lembaga keuangan mikro syariah (BMT) terkadang tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*, sehingga menimbulkan persepsi bahwa sistem jual beli (*murābahah*) yang diimplementasikan lembaga keuangan mikro syariah (BMT) meragukan aspek syar'inya. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dan kesesuaian penyertaan akad wakalah pada pembiayaan *murābahah* dengan fatwa DSN-MUI di KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera. Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan desalitatif, pengambilan data dengan pengamatan, wawancara atau penelaah dokumen. Sedangkan jenis pelaporan menggunakan analisis diskriptif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam prakteknya proses akad *murābahah* dengan menyertakan akad *wakalah* di BMT Kube Colomadu Sejahtera, adanya penggabungan akad *wakalah* dengan *murābahah* dalam satu waktu, sehingga dikatakan tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang *murābahah*.

Kata kunci: *murābahah*, *wakalah*, fatwa DSN-MUI, BMT Kube Colomadu Sejahtera.

Abstract

Financing of sale and purchase (*murābahah*) is a contract of sale and purchase of goods with the selling price and price of goods agreed upon, and the seller must open the cost of the goods honestly to the buyer of the institution position it is purchasing goods needed by the customer and then the goods produced sold at an agreed sale price and can be paid in installments or settled in a certain period. Related to the financing of buying and selling (*murābahah*), sometimes syariah micro finance institution (BMT) includes *wakalah* contract in *murābahah* financing, in BMT represents purchases of goods to members and BMT only gives money to members, then members buy their own goods in accordance with the contract. Thus, in practice syariah micro finance institution (BMT) are sometimes incompatible with the DSN-MUI Fatwa No. 04 DSN-MUI/IV/2000 about *murābahah*, thus raising the perception that the system of sale and purchase of *murābahah* implemented by Islamic micro finance institution (BMT) doubt its syar'i aspect. So the purpose of this study is to determine the implementation and suitability of *wakalah* participation in *murābahah* financing with Fatwa DSN-MUI in BMT Kube Colomadu Sejahtera. This research is field research by using qualitative design, data retrieval by interview observation or document review. While

the type of reporting using descriptive analysis. From the results of research shows that in practice *murābahah* contract process by including *wakalah* in BMT Kube Colomadu Sejahtera, the merger of *wakalah* contract with *murābahah* in one time, so it is said not in accordance with the Fatwa DSN-MUI about *murābahah*.

Keyword : *Murābahah*, *Wakalah*, Fatwa DSN-MUI, BMT Kube Colomadu Sejahtera

1. PENDAHULUAN

Berbagai macam produk dan jasa yang ditawarkan oleh BMT maupun bank syariah di Indonesia, produk *murābahah* yang paling banyak dipraktekkan dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Ada sekitar 60% dari produk perbankan syariah menggunakan transaksi akad *murābahah* sisanya sebanyak 40% menggunakan skema akad *mudharabah*.¹ menurut Choudury, dominannya pembiayaan *murābahah* terjadi karena pembiayaan ini cenderung memiliki resiko yang lebih kecil dan lebih mengamankan bagi *shareholder*.²

Mengingat fungsi lembaga keuangan adalah sebagai mediasi yang terkadang tidak memungkinkan untuk melakukan pembelian langsung dalam setiap transaksi pembiayaan karena keterbatasan pihak lembaga keuangan mikro syariah untuk membeli barang tersebut, keterbatasan tersebut baik dari segi waktu maupun tenaga yang ada, atau tidak mau direpotkan dengan pembelian barang yang dimurabahahkan, maka lembaga keuangan keuangan menerapkan sistem *wakalah* (mewakilkkan) kepada nasabah atau pihak lain untuk melakukan pembelian.³

Pada penyertaan *wakalah* dalam pembiayaan *murābahah*, lembaga keuangan syariah hanya memberi uang, dan nasabah menerima uang untuk melakukan pembelian (pengadaan) barang sesuai dengan akad. Konsep ini bersifat praktis dan efisien karena tidak mungkin lembaga keuangan syariah melakukan pembelian sendiri setiap ada pembiayaan jual beli. Segala sesuatunya dipercayakan pada nasabah karena dengan mengandalkan akad berarti sudah mengikat.⁴

Dalam prakteknya, pemberian *wakalah* kepada nasabah yang dilakukan lembaga keuangan syariah menurut penulis terkadang kurang bijak dan tidak berhati-hati sehingga menimbulkan persepsi masyarakat bahwa sistem jual beli yang di implementasikan lembaga keuangan syariah menjadi meragukan aspek

¹Siti Huriyah, *Pembiayaan*, hlm. 9.

²ibid

³Muhammad Nizarul Alim, *Muhasabah keuangan syariah* (Surakarta: AQWAM: 2011), hlm. 79-80.

⁴Ibid, hlm. 80-81.

syar'inya. Karena seolah lembaga keuangan syariah telah melakukan beberapa transaksi sekaligus ketika terjadi akad. Di antaranya penyerahan dana, pembelian barang, dan penjualan barang kepada nasabah. Akad penjualan seolah-olah telah dilakukan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah meskipun barang tersebut belum dimiliki oleh lembaga keuangan syariah. Padahal, secara syariah menjual barang yang belum dimiliki tidak diperbolehkan.⁵ Dan dalam fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000. Telah ditetapkan bahwa; “*Jika LKS hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli murābahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik LKS. Bukan sebelum pemberian barang* .

Penulis dalam penelitian ini tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelaksanaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murābahah* pada BMT Kube Colomadu Sejahtera, apakah dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan apa yang telah di fatwakan oleh DSN-MUI apakah belum.

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas, dalam penyusunan skripsi ini penulis tertarik meneliti tentang “**Analisis Penerapan Wakalah Pada Pembiayaan Murābahah di KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera**”

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: bagaimana implementasi penyertaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murābahah* di BMT Kube Colomadu? Bagaimana kesesuaian penerapan *wakalah* pada pembiayaan *murābahah* di BMT Kube Colomadu Sejahtera terhadap fatwa DSN-MUI?

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :Untuk mengetahui implementasi penyertaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murābahah* di BMT Kube Colomadu Sejahtera. Untuk mengetahui kesesuaian antara teori dan praktek dalam penerapan *wakalah* pada pembiayaan *murābahah* di BMT Kube Colomadu Sejahtera.

2. METODE

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan desain kualitatif. Pendekatan ini peneliti menggunakan

⁵Ibid.

literature teori dari buku-buku dalam menganalisis sebagai bahan acuan dalam penelitian. Dengan studi kasus penelitian ini diharapkan banyak menggali masukan dan informasi dari data-data yang telah peneliti kumpulkan dari berbagai sumber yang kemudian akan menghasilkan data deskriptif.⁶

Adapun subjek penelitian dalam tulisan ini, adalah BMT Colomadu Sejahtera, yang berlokasi di Kompleks Ruko Colomadu Regency, Jl. Adi Sumarmo No 200, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar.

Metode ini bertujuan untuk mendapatkan data yang relevan dengan topik penelitian melalui cara: metode observasi, wawancara terstruktur dan dokumentasi.

Peneliti dalam menganalisa data melakukan teknik penelitian deskriptif. Yaitu teknik penelitian dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul, setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, data-data tersebut dianalisa dengan cara membandingkan kenyataan yang terdapat di lembaga pembiayaan mikro syariah dengan teori-teori yang telah dipelajari kemudian hasil analisa ini ditarik suatu kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Dan Kesesuaian Penerapan Wakalah Pada Pembiayaan Murābahah Di BMT Kube Colomadu Sejahtera

Implementasi *wakalah* pada BMT Kube Colomadu Sejahtera dalam upaya pemberian kuasa kepada anggota, bertujuan untuk membantu anggota agar dapat memiliki barang yang dikehendaki oleh anggota. Dengan mendapatkan tambahan modal yang dialokasikan BMT kepada anggota lewat transfer atau secara langsung kepada anggota, anggota dapat memenuhi kebutuhan akan pembelian suatu barang dengan segera, bahwa anggota nantinya membeli sendiri barang yang dikehendaki.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari Manager lembaga keuangan mikro syariah atau BMT Kube Colomadu Sejahtera, pelaksanaan pembiayaan murabahah terdapat dual model, yaitu: *Murābahah* murni,

⁶Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 4.

dalam pembiayaan *murābahah* murni ini pihak BMT membelikan barang yang diinginkan oleh anggota, dalam hal pembelian sepeda motor pihak BMT bekerjasama dengan dealer serta mengajak anggota untuk memilih motor yang dikehendaki kemudian pihak BMT yang membayar kepada pihak dealer.

Murābahah dengan menyertakan akad *wakalah*. Dalam penyertaan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murābahah* ini pihak BMT hanya memberikan uang kepada anggota, kemudian anggota membelikan sendiri barang yang dikehendaki tersebut.

Dalam penyelesaian administrasi pada pembiayaan *murābahah* dengan penyertaan akad *wakalah* di BMT Kube Colomadu Sejahtera dijumpai bahwa akad *wakalah* ini terjadi seiring dengan pelaksanaan akad *murābahah* yang dilaksanakan oleh anggota dengan pihak BMT Kube Colomadu Sejahtera. Yang mana dalam pelaksanaan pembiayaan *murābahah* dengan penyertaan akad *wakalah* yang dilakukan oleh BMT Kube Colomadu Sejahtera, akad *wakalah* dilaksanakan beriringan dengan akad *murābahah*, jadi ketika akad *wakalah* ditandatangani, pada saat yang bersamaan anggota juga menandatangani akad *murābahah*.

Walaupun diperbolehkan oleh DSN-MUI dalam penyertaan *wakalah* pada akad *murābahah*, namun pada implementasinya akad *wakalah* yang menjadi pelengkap dalam pembiayaan *murābahah* yang dilaksanakan oleh BMT Kube Colomadu Sejahtera menurut penulis apabila dikaji lebih jauh, akan ditemukan ketidak sesuaian dengan Fatwa DSN-MUI, karena pihak BMT ketika dalam pelaksanaan *wakalah* juga menyelesaikan akad *murābahah* dengan anggota, sehingga terlihat bahwa BMT tidak melakukan jual beli dengan menyerahkan barang kepada anggota tetapi menyerahkan uang dan menghitung margin dari jumlah uang yang telah diberikan kepada anggota, sehingga pembiayaan ini lebih tepat dikatakan sebagai akad pinjaman atau utang kepada anggota untuk membantu anggota menutup kekurangan atas modal awal yang dimiliki anggota untuk membeli barang yang ada pada *supplier*. Apabila di analisa lebih jauh, implementasi akad

wakalah dalam hal ini hanya sebagai helah yang tidak ditempatkan pada posisi yang sebenarnya.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan di dukung teori-teori yang dijadikan landasan berpikir dalam memahami permasalahan-permasalahan, disertai apa yang telah penulis paparkan pada pembahasan dalam kajian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

Pertama, Dalam pelaksanaan pembiayaan *murābahah* di KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera terdapat dual model pembiayaan *murābahah*, yaitu pembiayaan *murābahah* murni dan *murābahah bil wakalah*. Produk pembiayaan BMT Kube Colomadu Sejahtera yang menggunakan *murābahah* murni diantaranya pada penjualan kendaraan sepeda motor, karena KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera sudah bekerjasama dengan beberapa daeler. Sedangkan dalam pembiayaan *murābahah* dengan menyertakan akad *wakalah* pihak BMT hanya memberikan uang yang nantinya anggota membelikan barang sendiri kepada supplier.

Kedua, Pelaksanaan akad *wakalah* sebagai akad pelengkap dalam pembiayaan *murābahah*, demi memudahkan pelaksanaan pembiayaan antara nasabah dengan BMT belum berjalan dengan semestinya. Karena pihak-pihak yang terkait belum menjalankan akad *wakalah* tersebut sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan: “Jika LKS hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik LKS.”. kalo aturan ini tidak diterapkan maka akan terkesan BMT hanya melakukan hillah atau trik untuk menutupi perilaku yang sebetulnya, yaitu sama dengan pembiayaan konvensional yang berbau ribawi.

4.2. Saran

Apabila BMT menggunakan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murābahah* khususnya, sebaiknya BMT sekuensi (urutan atau tahapan) proses transaksi tetap harus tampak mulai dari proses akad, penyerahan dana, pembelian, penyerahan barang yang dibeli atau bukti pembelian (barang atau dokumen pembelian yang sah dan andal) dari wakil (nasabah) kepada muwakkil (LKS), konfirmasi pembelian oleh LKS dan kemudian penjualan serta serah terima barang (dokumen pembelian) sehingga kita tahu barang, jenis, bahkan merek. Sekuensi ini menunjukkan bahwa barang yang dijual telah sah dimiliki dan siap untuk dijual.

Mengingat *murābahah* merupakan pembiayaan yang hampir sama seperti bunga, oleh karena itu LKS, khususnya BMT hendaknya memperhatikan regulasi yang sudah dibuat oleh DSN-MUI maupun PBI, sehingga tidak menimbulkan persepsi masyarakat bahwa sistem jual beli (*murābahah*) yang diimplementasikan lembaga keuangan syariah menjadi meragukan aspek syariahnya.

Dalam hal pembelian terhadap barang yang diinginkan nasabah diwakilkan (dikuasakan) juga kepada wakil (nasabah) untuk kepentingan praktis dan efisiensi maka seharusnya LKS memberikan ujroh (honorarium dan atau biaya transport) kepada wakil (nasabah) tersebut karena ada jasa dan pekerjaan yang dilakukan oleh wakil.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti tentang sejauh mana peran DPS dalam hal pengawasan terhadap operasional yang dilakukan oleh KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera, agar senantiasa tetap menjaga prinsip-prinsip syariah dalam produknya baik untuk produk penghimpunan dana maupun penyaluran dana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali musyaidi, Khalid.2012. Buku Pintar Muamalah Aktual & Mudah.Terj. Abu Zidna. Klaten: WAFA.
- Alim, Muhammad Nizarul. 2011. *Muhasabah Keuangan Syariah*. Solo: AQWAM

- Alwi, Syafaruddin. 2013. *Memahami Sistem Perbankan Syariah*: BUKU REPLUBIKA
- Antonio, Muhammad syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Depok: GEMA INSANI
- ARIF, M Nurianto. 2015. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktek*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA
- Buchori, S Nur.2012. *Koprasi Syariah Teori dan Praktek*. Banten: Pustaka Aufa Media.
- Huda, Nurul dkk. 2016. *Baitl Maal Wal Tanwil Sebuah Tinjauan Teoritis*. Jakarta: AMZAH.
- Janwari, Yadi. 2005. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mardani, S Nur.2012. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: PRENAMEDIA GRUP.
- Muhamad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Muhammad, 2004.*Teknik Penghitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- , 2005.*Sistem dan Prosedur Oprasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Sabiq, sayyid. 2004. *Fiqhus Sunnah*.Terj.Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Saeed, Abdullah. 2004. *Bank Islam Dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Umam, Khotibul. 2011. *Legistasi Fikih Ekonomi Dan Penerapannya Dalam Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*: Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.